



**DINAS
KEHUTANAN**

RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN



**PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kehutanan Kalimantan Utara.

Proyeksi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan dan melindungi keberadaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini dan akhirnya semoga dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	74
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	74
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.1.2 Telaahan Terhadap Prioritas Provinsi	77
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	85
BAB V PENUTUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara s/d Tahun 2021	8
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD KPH Tana Tidung s/d Tahun 2021	12
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD KPH Tarakan s/d Tahun 2021	17
Tabel 2.1.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD KPH Malinau s/d Tahun 2021	20
Tabel 2.1.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD KPH Bulungan s/d Tahun 2021	22
Tabel 2.1.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD KPH Nunukan s/d Tahun 2021	25
Tabel 2.1.7	Tabel 2.1.7 Tabel Capaian Pengukuran Kinerja.....	32
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.3.1	Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah	36
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	40
Tabel 2.4.2	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 UPTD KPH Tana Tidung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	46
Tabel 2.4.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 UPTD KPH Tarakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	49
Tabel 2.4.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 UPTD KPH Malinau Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	53
Tabel 2.4.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 UPTD KPH Bulungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	58

Tabel 2.4.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 UPTD KPH Bulungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	62
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	68
Tabel 2.5.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 UPTD KPH Tana Tidung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	69
Tabel 2.5.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 UPTD KPH Tarakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	70
Tabel 2.5.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 UPTD KPH Malinau Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	71
Tabel 2.4.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 UPTD KPH Bulungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	72
Tabel 3.1.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Yang Mendukung Prioritas Nasional	75
Tabel 3.1.2	Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah	80
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	84
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	86
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD KPH Tana Tidung Dinas Kehutanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	90
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD KPH Tarakan Dinas Kehutanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	94

Tabel 4.4	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD KPH Malinau Dinas Kehutanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	98
Tabel 4.5	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD KPH Bulungan Dinas Kehutanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	101
Tabel 4.6	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 7.546.770 km² memiliki kawasan hutan seluas 6.997.155 ha berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 dan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan terbagi dalam beberapa fungsi yaitu hutan produksi seluas 3.245.734 Ha, hutan lindung seluas 1.055.770 Ha, hutan konservasi seluas 1.268.539 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.368.018 ha. Kalimantan Utara termasuk daerah tropis yang dilewati garis khatulistiwa, oleh karena itu Kalimantan Utara memiliki keragaman dan endeminitas yang cukup tinggi. Posisi strategis Sumber Daya Hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) peran dalam pembangunan yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dan daerah serta masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kehidupan. Ditinjau dari komposisi luasannya, dapat dilihat bahwa $\pm 33,5$ % kawasan hutan di Kalimantan Utara difungsikan untuk perlindungan dan konservasi yang jika tidak dijaga maka akan berdampak pada kerusakan hutan.

Pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 sebagai tahun kedua dari periode pembangunan kehutanan 2021 – 2026, menekankan pada upaya Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, Perlindungan kawasan hutan dan lahan baik dari ancaman penebangan liar dan kebakaran hutan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomi dan pemberdayaan serta pembinaan kelompok tani hutan serta pemantapan kawasan

hutan. Keempat fokus tersebut merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026.

Kebijakan pembangunan kehutanan tersebut mencerminkan tekad untuk melaksanakan pembangunan kehutanan yang mantap dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan kebijakan pembangunan dimaksud diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan kawasan hutan yang ada selain untuk memproduksi hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa wisata dan lingkungan juga untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kehutanan pada tahun 2022 ini berpedoman juga pada Kebijakan Kementerian Kehutanan yang diintegrasikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Utara yang menekankan pada usaha pembangunan kehidupan sosial dan budaya, pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian, pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik. Kebijakan pembangunan dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2022. Program, kegiatan serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi acuan penjabaran kedalam kegiatan-kegiatan yang lebih rinci bagi para pelaku pembangunan kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf b Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sehingga penyusunan Rencana Kerja ini merupakan kewajiban bagi organisasi perangkat daerah sebelum menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 mengacu kepada beberapa produk perundang – undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kehutanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang

kehutanan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2022 dapat tercapai;

2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di kehutanan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Kehutanan;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Kehutanan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2022;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kehutanan tahun 2022;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
6. Acuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR). Untuk mencapai sasaran strategis telah dilaksanakan dengan 13 program yang terdiri dari 36 kegiatan. Untuk yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 8 Program dan 24 Kegiatan sedangkan yang bersumber dari DBH SDA DR berjumlah 5 program dan 13 Kegiatan. Total Anggaran Belanja Langsung Dinas Kehutanan Tahun 2020 adalah sebesar Rp 23.410.736.338,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 7.107.482.838,00 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan anggaran DBH SDA DR sebesar Rp. 16.303.253.500,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s.d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.28.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.28.01.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.28.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.28.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi keuangan kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Kantor	40%	-	-	-	-	40%	40%	100%
3.28.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	100%
3.28.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik	30 Unit	-	-	-	-	30 Unit	30 Unit	100%
3.28.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	44 Unit	-	-	-	-	44 Unit	44 Unit	100%
3.28.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	180 Porsi	-	-	-	-	180 Porsi	180 Porsi	100%
3.28.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	125 Kali	-	-	-	-	125 Kali	125 Kali	100%
3.28.01.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
3.28.01.01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
3.28.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	200 Surat	-	-	-	-	200 Surat	200 Surat	100%
3.28.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%

3.28.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Unit	-	-	-	-	48 Unit	48 Unit	100%
3.28.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	100%	-	-	-	-	68 Unit	68 Unit	100%
3.28.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	48 Unit	-	-	-	-	48 Unit	48 Unit	100%
3.28.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	20 Unit	100%
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2%					2%	2%	100%
3.28.03.01.01	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH	10%	-	-	-	-	10%	10%	100%
3.28.03.01.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang telah melaksanakan tata batas pembagian	5 KPH	-	-	-	-	5 KPH	5 KPH	100%
3.28.03.01.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional KPH	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
3.28.03.01.03	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Unit Manajemen yang terbina	30%	-	-	-	-	30%	30%	100%
3.28.03.01.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	11 Unit	-	-	-	-	11 Unit	11 Unit	100%
3.28.03.01.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis	2%	-	-	-	-	2%	2%	100%
3.28.03.01.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit yang tersedia	27.000 Bibit	-	-	-	-		27.000	100%
3.28.03.01.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30 IUPHHK	-	-	-	-	30 IUPHHK	30 IUPHHK	100%
3.28.03.01.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Berkurangnya Tingkat Kerusakan Hutan	1%	-	-	-	-	1%	1%	100%
3.28.03.01.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	110 Kali	-	-	-	-	110 Kali	110 Kali	100%
3.28.03.01.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan	0,8%	-	-	-	-	0,8%	0,8%	100%
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	persentase kawasan dikelola	10%	-	-	-	-	10%	10%	100%
3.28.04.01.03	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Kawasan yang dikelola	1 Kawasan	-	-	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
3.28.04.01.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen							
3.28.04.01.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%
3.28.04.01.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan jumlah kelompok usaha masyarakat	20%	-	-	-	-	20%	20%	100%
3.28.05.01.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Masyarakat Yang Terbina dalam Kawasan Hutan	5%	-	-	-	-	5%	5%	100%
3.28.05.01.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Peningkatan SDM Penyuluh	15 Orang	-	-	-	-	15 Orang	15 Orang	100%
3.28.05.01.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Unit Usaha yang dikembangkan	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	20 Unit	100%
3.28.05.01.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Perhutanan Sosial yang terbentuk	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase DAS yang dikelola	10%	-	-	-	-	10%	10%	100%
3.28.06.01.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	-	-	-	-	1 DAS	1 DAS	100%
3.28.06.01.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen RPDAS	1 Dokmen	-	-	-	-	1 Dokmen	1 Dokmen	100%

3.04.1.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang		100%	-	-	-			
3.04.1.01.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	-	10.000 Lembar	4000	4000	100%			
3.04.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	36 Bulan	12	12	100%			
3.04.1.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	-	60 Unit	20	20	100%			
3.04.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		88 Unit	24	18	75%			
3.04.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan		36 Bulan	12	12	100%			
3.04.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		24 Bulan	12	12	100%			
3.04.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan		36 Bulan	12	12	100%			
3.04.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		36 Bulan	12	12	100%			
3.04.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan		24 Bulan	12	12	100%			
3.04.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		70 Unit	101	110	109%			
3.04.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		640 Porsi	350	548	157%			
3.04.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		600 Porsi	250	308	123%			
3.04.1.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		322 Kali	100	146	146%			
3.04.1.01.21	Perjalanan dinas luar negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	-	-	-	-	-			
3.04.2.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-			
3.04.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		59 Unit	24	24	100%			
3.04.3.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya		-	-	-	-			
3.04.3.05.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya		130 Orang	19	19	100%			
3.04.4.15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan								
3.04.4.15.19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan		74 Unit Manajemen	32	32	100%			
3.04.6.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Kawasan Konservasi yang terkelola		-	-	-	-			
3.04.6.17.16	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi		100 Orang	40	40	100%			
3.04.6.17.18	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah kawasan yang dikelola		-	1	1	100%			
3.04.8.21	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan		-	-	-	-			
3.04.8.21.02	Rapat koordinasi penyuluh kehutanan	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan		45 Orang	15	15	100%			
3.04.8.21.05	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Jumlah Sapras Penyuluh		-	6	6	100%			
3.04.9.22	Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan	Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya		-	-	-	-			
3.04.9.22.01	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Jumlah Peserta koordinasi		100 Orang	50	50	100%			
3.04.9.22.05	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan		3 Dokumen	1	1	100%			
3.04.11.25	Program Pengelolaan DAS	Persentase Luasan DAS yang terkelola		-	-	-	-			
3.04.11.25.01	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS		-	1	-	-			

3.04.11.25.10	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Jumlah Dokumen Kualitas DAS meningkat dengan indeks turunnya tingkat kekritisitas DAS Prioritas		2 Dokumen	1	1	100%			
3.04.11.28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan								
3.04.11.28.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan		-	35	35	100%			
3.04.11.28.04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla		-	40	33	83%			
3.04.11.28.05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Patroli		-	35	35	100%			
3.04.11.28.06	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	Jumlah Kegiatan Sosialisasi		-	-	-				
3.04.11.28.07	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Kesiapsiagaan		-	-	-	-			
3.04.11.28.08	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Pyengaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan		-	75	75	100%			
3.04.11.28.09	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain lain	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi			100	0	0%			
3.04.11.28.10	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan		-	20	20	100%			
3.04.11.29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan		-	-	-	-			
3.04.11.29.01	Patroli Pengamanan	Jumlah kegiatan patroli pengamanan		-	16	16	100%			
3.04.11.29.02	Sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan		-	4	2	50%			
3.04.11.29.03	Koordinasi	Jumlah peserta rapat koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan		-	-	-	-			
3.04.11.30	Program Pengembangan Perbenihan	Presentase rehabilitasi lahan kritis		-	-	-	-			
3.04.11.30.02	Pembangunan Sumber Benih	Juniah Unit Usaha Perbenihan		-	3	3	100%			
3.04.11.30.03	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SDM Yang Berkualitas			8	-	-			
3.04.11.31	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Presentase rehabilitasi lahan kritis		-	-	-	-			
3.04.11.31.01	Rehabilitasi Mangrove	Jumlah lahan mangrove yang direhabilitasi (Dana Reboisasi)		-	506	506	100%			
3.04.11.32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan		-						
3.04.11.32.03	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif		-	11	11	100%			

Tabel 2.1.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPTD. KPH Tarakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan									
3.04.3.04.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	20.000 Surat	4.000 Surat	4.000 Surat	4.000 Surat	100%	4.000 surat	12.000 Surat	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang Disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Eks	24 Eks	24 Eks	24 Eks	100%	24 Eks	72 Eks	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	2000 Porsi	400 Porsi	400 Porsi	400 Porsi	100%	400 Posi	1200 Porsi	60.00%
3.04.3.04.01.03.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	980 kali	30 kali	200 kali	200 kali	100%	250 kali	480 kali	48.98%
3.04.3.04.01.03.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	620 kali	20 kali	100 kali	100 kali	100%	100 kali	220 kali	48.98%
3.04.3.04.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	500 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60.00%
3.04.3.04.01.01.02.13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	22 stel	0	22	22	100%	0	22	100.00%
3.04.3.04.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	12 Unit	80.00%
3.04.3.04.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	1	1	100%
3.04.3.04.01.03.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	45%	9%	30%	30%	100%	30%	69%	91.11%
3.04.3.04.01.01.15.15	Pengembangan lebah madu	Jumlah Koloni lebah madu	30 Unit	0	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	0	100%
3.04.3.04.01.01.15.23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	33 Kali	13 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	33 Kali	76%
3.04.3.04.01.03.28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
3.04.3.04.01.03.28.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penegndalian Kebakaran Hutan dan Lahan	80 Unit	0	0	0	0	39 Unit	39 Unit	65%
3.04.3.04.01.03.28.02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	Jumlah Kegiatan Sistem Kemitraan pada Masyarakat Peduli Api	6 MPA	0	2 MPA	2 MPA	100%	0	2 MPA	33%
3.04.3.04.01.03.28.04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran	48 Kegiatan	0	0	0	0	23	23	48%
3.04.3.04.01.03.28.05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli Pencegahan Karhutla	48 Kegiatan	0	0	0	0	24	24	50%
3.04.3.04.01.03.28.06	Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	4 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50%

3.04.3.04.01.03.28.08	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bintek/ Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bintek/ Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Kegiatan	0	0	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
3.04.3.04.01.03.28.11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.3.04.01.03.29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Persentase Realisasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan								
3.04.3.04.01.03.29.01	Patroli Pengamanan	Jumlah Patroli Pengamanan	48 Kegiatan	0	0	0	0	20 Kegiatan	20 Kegiatan	40%
3.04.3.04.01.03.30	Program Pengembangan Perbenihan	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Perbenihan								
3.04.3.04.01.03.30.04	Pembuatan/Pengadaan Bibit	Jumlah Unit Persemaian yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0%
3.04.3.04.01.03.31	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi	Persentase Capaian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3.04.3.04.01.03.31.01	Rehabilitasi Lahan	Jumlah Lahan yang Direhabilitasi	30 Ha	0	18	18	100%	6 Ha	24 Ha	8000%
3.04.3.04.01.03.32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Capaian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3.04.3.04.01.03.32.03	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	Jumlah Bantuan untuk KUPS	8 KUPS	0	0	0	0	4 KUPS	4 KUPS	50%
3.04.3.04.01.03.34	Program Penyuluhan (DBH-DR)	Jumlah Kegiatan Penyuluhan yang Dilaksanakan								
3.04.3.04.01.03.34.01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD	Jumlah Dokumen Programa yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.04.3.04.01.03.34.02	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Metode dan Materi Penyuluhan	3 Metode/Materi	0	0	0	0	3 Metode/Materi	3 Metode/Materi	100%
3.04.3.04.01.03.34.03	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan	1 Unit	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100%
3.04.3.04.01.03.35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)	Persentase Realisasi Operasional KPH								
3.04.3.04.01.03.35.01	Tata Hutan dan Perencanaan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	50%

Tabel 2.1.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPTD KPH Malinau Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2017-2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.28	Bidang Pemerintahan Bidang Kehutanan									
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	40%	-	-	-	-	40%	40%	100%
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	2 Orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	100%
3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
3.28.01.1.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi	80 Porsi	-	-	-	-	80 Porsi	80 Porsi	100%
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dalam & Luar Daerah	150 Kali	-	-	-	-	150 Kali	150 Kali	100%
3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	40.000 Lembar	-	-	-	-	40.000 Lembar	40.000 Lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2017-2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	11 Unit	-	-	-	-	11 Unit	11 Unit	100%
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Yang Terpelihara	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2%	-	-	-	-	2%	2%	100%
3.28.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional KPH	10%	-	-	-	-	10%	10%	100%
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	jumlah sarana dan prasarana operasional KPH	150 Unit	-	-	-	-	150 Unit	150 Unit	100%
3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Berkurangnya Tingkat Kerusakan Hutan	1%	-	-	-	-	1%	1%	100%
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan	160 Hari	-	-	-	-	160 Hari	160 Hari	100%
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli Karhuta, Pengamanan dan Personil MPA	120 Hari	-	-	-	-	120 Hari	120 Hari	100%

Tabel 2.1.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPTD KPH Bulungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-3) 2017-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan	P								
3.04.3.04.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
3.04.3.04.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3.250 Lembar	1000	1000	95	10%	100	1195	9,20%
3.04.3.04.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bulan	12	12	12	100%	12	36	81,25%
3.04.3.04.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	48 Bulan	12	12	12	100%	12	36	80%
3.04.3.04.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	48 Bulan	12	1	1	100%	7	20	41,18 %
3.04.3.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	92 Unit	29	12	12	100%	12	53	81,25 %
3.04.3.04.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	15 Paket	1	1	1	100%	12	14	100%
3.04.3.04.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48 Bulan	12	12	12	100%	12	36	81,25%
3.04.3.04.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	10	6	6	100%	12	28	81,25%
3.04.3.04.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	500 Porsi	150	100	100	100%	5	255	314%
3.04.3.04.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400 Kali	100	25	25	100%	250	375	55,55%
3.04.3.04.01.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	240 Kali	60	85	85	100%	50	195	178%

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	500 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
3.04.3.04.01.01.02.11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Unit Yang Tersewa	1 unit	1	1	1	100%	1	3	100%
3.04.3.04.01.03.28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	60 %	20%	10%	10%	100%	10%	40%	66.67%
3.04.3.04.01.03.28.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	150 Unit	0	135	135	100%	7	142	22.50%
3.04.3.04.01.28.03	Penerapan Agroforestry, Agro Silavo Pastura Dan Kegiatan Sejenisnya	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	24 Kegiatan	0	2	2	100%	2	24	40.00%
3.04.3.04.01.03.28.02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api*	Jumlah kegiatan Pembentukan MPA	6 MPA	0	6	6	100%	6	6	100%
3.04.3.04.01.03.28.04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla	24 Kali	0	50	50	100%	24	24	100%
3.04.3.04.01.03.28.05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah Kegiatan Patroli	12 Kegiatan	0	6	6	100%	12	12	100%
3.04.3.04.01.03.28.06	Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode*	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 Kegiatan	0	2	2	100%	2	2	100%
3.04.3.04.01.03.28.11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah kegiatan Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4 Kegiatan	0	4	4	100%	4	4	100%
3.04.3.04.01.03.28.36	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu - Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2 Kegiatan	0	30	30	100%	30	30	100%
3.04.3.04.01.03.29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Persentase realisasi kegiatan perlindungan dan Pengamanan Hutan	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
3.04.3.04.01.03.29.01	Patroli pengamanan	Jumlah Patroli Pengamanan	20 Kegiatan	0	10	10	100%	0	0	100%
3.04.3.04.01.03.29.1	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	55 %	47%	2%	2%	100%	2%	51%	92.73%
3.04.3.04.01.03.31	Rehabilitasi Lahan*	Jumlah lahan yang direhabilitasi	20 Kegiatan	0	20	20	100%	0	0	0%
3.04.3.04.01.03.32	Program Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase capaian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
3.04.3.04.01.03.32.1	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL*	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	15 KUPS	0	13	13	100%	0	0	100%
3.04.3.04.01.03.32.2	Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan , hutan desa hutan adat dan kemitraan Dalam Rangka RHL*	Jumlah Kegiatan Pembentukan Perhutanan Sosial	15 KUPS	0	3	3	100%	0	0	100%

3.04.3.04.01.03.30	Program Pengembangan Perbenihan	Persentase capaian kegiatan Pengembangan Perbenihan	100%	0%	20%	0%	0	100%	100%	100%
3.04.3.04.01.03.30.4	Pembuatan/pengadaan bibit	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 Unit	0	1	1	100%	0	0	100%
3.04.3.04.01.03.34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan	50%	0%	50%	50%	100%	0%	50%	100.00%
3.04.3.04.01.03.34.4	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	Jumlah Program Penyuluhan	1 Dokumen	0	1	1	100%	0	0	0.00%
3.04.3.04.01.03.35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	persentase cakupan layanan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	60%	0	24	4	100%	60%	4.6	767%
3.04.3.04.01.03.35.4	Tata hutan dan perencanaan*	Jumlah Dokumen yang di sediakan	1 Dokumen	0	2	2	100%	44	46	100%
3.04.3.04.01.03.35.4	Promosi Peluang Investasi Di KPH*	Jumlah Dokumen yang di sediakan	1 Dokumen	0	1	1	100%	3	4	100%

Tabel 2.1.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s.d Tahun 2021

KODE									Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
													Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1									2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
3	28	01						Prpgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi										
3	28	01	1	02				Administrasi Keuangan perangkat Daerah	presentase unit kerja yang memperoleh layanan administrasi keuangan	100	%					100	%	100	1.00
3	20	01	1	02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12	Bulan					12	Bulan	12	1.00
3	28	01	1	05				Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian	100	%					100	%	100	1.00
3	28	01	1	05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	30	Stel					30	Stel	30	1.00
3	28	01	1	05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	3	Orang					3	Orang	3	1.00
3	28	01	1	06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Layanan Administrasi Umum	100	%					100	%	100	1.00
3	28	01	1	06	02			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Bulan					12	Bulan	12	1.00
3	28	01	1	06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	Bulan					12	Bulan	12	1.00
3	28	01	1	06	04			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Porsi	270	Porsi					270	Porsi	270	1.00
3	28	01	1	06	05			Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan					12	Bulan	12	1.00
3	28	01	1	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50	Kali					50	Kali	50	1.00
3	28	01	1	08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase unit kerja yang memperoleh jasa penunjang	100	%					100	%	100	1.00
3	28	01	1	08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	5400	Lembar					5400	Lembar	5400	1.00
3	28	01	1	08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan					12	Bulan	12	1.00
3	28	01	1	08	03			Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	10	Unit					10	Unit	10	1.00
3	28	01	1	08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan					12	Bulan	12	1.00

3	28	01	1	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase unit kerja yang memperoleh pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%					100	%	100	1.00
3	29	01	1	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19	Unit					19	Unit	19	1.00
3	28	01	1	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah/Gedung/Gudang/Parkiran Dinas yang Disewa	1	Unit					1	Unit	1	1.00
3	28	03					Program Pengelolaan Hutan	Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang lestari										
3	28	03	1	01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	terpenuhinya sarana dan prasarana operasional KPH	100	%					100	%	100	1
3	28	03	1	01	03		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana operasional KPH	173	Unit					173	Unit	173	1.00
3	28	03	1	02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP, RPHJpd dan RO	100	%					100	%	100	1
3	28	03	1	02	01		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP), rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJpd) dan rencana	4	Dokumen					4	Dokumen	4	1
3	28	03	1	05			Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	terlaksananya Pelindungan Hutan pada hutan Lindung dan Hutan Produksi	100	%					100	%	100	1
3	28	03	1	05	01		Pencegahan dan Pebatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan	26	Kegiatan					26	Kegiatan	26	1.00
3	28	03	1	05	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan/Penangulangan Karhutla	5	Kegiatan					5	Kegiatan	5	1
3	28	03	1	06			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK)	terlaksana pengolahan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH										
3	28	03	1	06	03		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan kayu dengan Tidak mengurangi Fungsi Pokoknya	Meningkatnya Luas Lahan Agroforestry	23	Ha					23	Ha	23	1.00
3	28	05					Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	terwujudnya SDM penyuluh kehutanan yang berkompeten dan berkualitas serta masyarakat disekitar dan didalam kawasan										
3	28	05	1	01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	terlaksananya kegiatan penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	100	%					100	%	100	1
3	28	05	1	01	02		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah penguatan dan pendampingan	15	Kelompok Tani Hutan					15	Kelompok Tani Hutan	15	1.00
3	28	05	1	01	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok usaha dan KTH yang dikembangkan	4	Usaha					4	Usaha	4	1

TAHUN 2019

TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
KODE										Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan										Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Tahun 2019										Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan										Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)										Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun n-2										Target Program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun n-1)										Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																		Target Renja PD Tahun (n-2)					Realisasi Renja PD Tahun (n-2)															Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)					Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1										2										3										4										5										6										7										8=(7/6)										9										10 = (5+7+9)										11=(10/4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	04	01								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran													100	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

3	04	15	03			Pengembangan Hasil Hutan non-kayu	Jumlah Kelompok / Pelaku Usaha (KPH Nunukan)			1	Kelompok								
3	04	15	22			Pembinaan, Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah Izin Usaha Industri Hasil Hutan (KPH Nunukan)			30	Izin Usaha								
3	04	15	23			Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah kegiatan			1	Tahun								
3	04	15	36			Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Jumlah Sarana dan prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota (KPH Nunukan)			1	Unit								
3	04	16				Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Presentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan			51	%								
3	04	16	10			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat (KPH Nunukan)			2	Unit								
3	04	23				Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan			40	%								
3	04	23	03			Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura			1	kawasan								
3	04	23	05			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana(KPH Nunukan)			5	Kelompok KTH								

TAHUN 2020

KODE								Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun n-2					Target Program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
												Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1								2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
3	04	3	04	01	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	%	100	%	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim			500	Lembar	500	Lembar	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	Bulan	12	Bulan	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			5	Unit	12	Bulan	2.40			
3	04	3	04	01	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan operasional			6	Unit	4	Unit	0.67			
3	04	3	04	01	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan			12	Bulan	12	Bulan	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor			12	Bulan	12	Bulan	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan			1	Paket	12	Bulan	12.00			
3	04	3	04	01	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			12	Bulan	12	Bulan	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12	Bulan	12	Bulan	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5	Unit	3	Unit	0.60			
3	04	3	04	01	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			5	Unit	5	Unit	1.00			
3	04	3	04	01	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			300	Porsi	100	Porsi	0.33			
3	04	3	04	01	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			15	kali	8	kali	0.53			
3	04	3	04	01	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah			50	kali	30	kali	0.60			
3	04	3	04	01	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur			100	%	100	%	1.00			
3	04	3	04	01	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan			8	unit	3	unit	0.38			
3	04	3	04	01	04	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/parkiran/gudang/parkiran dinas yang disewa			1	unit	1	unit	1.00			
3	04	3	04	01	04	02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan			14	Stel	14	Stel	1.00			
3	04	3	04	01	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			12	Unit	10	Unit	0.83			

3	04	3	04	01	04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rumah yang di Rehab					3	Unit	3	Unit	1.00				
3	04	3	04	01	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					50	%	43	%	0.86				
3	04	3	04	01	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal					3	Orang	2	Orang	0.67				
3	04	3	04	01	04	28		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Presentase menurunnya tingkat kebakaran hutan					43	%	3	%	0.07				
3	04	3	04	01	04	28	01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengendalian Hutan dan Lahan yang dikembangkan					1	Kelompok	38	Unit	38.00				
3	04	3	04	01	04	28	02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	Jumlah MPA yang terbentuk dan Terbina					22	Kegiatan	2	Regu	0.09				
3	04	3	04	01	04	28	03	Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	Luas lahan agroforestry					30	Ijin Usaha	8	Ha	0.27				
3	04	3	04	01	04	28	04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya kegiatan Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan					19	Unit	24	Kegiatan	1.26				
3	04	3	04	01	04	28	05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					30	Kali	15	Kegiatan	0.50				
3	04	3	04	01	04	28	06	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	Jumlah Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode					3	%			0.00				
3	04	3	04	01	04	29		Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Persentase menurunnya Tingkat Kebakaran Hutan					38	Unit	3	%	0.08				
3	04	3	04	01	04	29	01	Patroli Pengamanan	Terlaksananya Patroli Pengamanan					4	Kegiatan	20	Kegiatan	5.00				
3	04	3	04	01	04	32		Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (RHL)					8	Ha	57	%	7.13				
3	04	3	04	01	04	32	01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (RHL)					24	Kegiatan	2	Usaha	0.08				
3	04	3	04	01	04	34		Program Penyuluhan (DBH-DR)*	Persentase Penyuluhan yang diberdayakan					24	kegiatan	57	%	2.38				
3	04	3	04	01	04	34	01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	Jumlah Dokumen					2	kegiatan	1	Dokumen	0.50				
3	04	3	04	01	04	34	02	Metode dan Materi Penyuluhan*	Jumlah Materi Penyuluhan					3	%	3	Metode	1.00				
3	04	3	04	01	04	34	03	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan*	Jumlah Sarana dan Prasarana					24	kegiatan	17	Unit	0.71				
3	04	3	04	01	04	35		Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	Presentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan													
3	04	3	04	01	04	35	01	Tata hutan dan perencanaan*	Jumlah Review Dokumen RPHJP dan Pembuatan Dokumen RPHJPd					3	Dokumen	3	Dokumen	1.00				

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPTD KPH Tana Tidung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s.d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan									
3.04.3.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
3.04.3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	0	200	100	95	95%	100	395	9,20%
3.04.3.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	15	12	12	100%	12	39	81,25 %
3.04.3.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0	0	0	0	0%	12	12	80%
3.04.3.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	0	0	0	0	0%	7	7	41,18 %
3.04.3.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	0	15	12	12	100%	12	39	81,25 %
3.04.3.04.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Bahan Kebersihan Kantor	0	24	0	0	0%	12	36	100%
3.04.3.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	0	15	12	12	100%	12	39	81,25%
3.04.3.04.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	15	12	12	100%	12	39	81,25%
3.04.3.04.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana pendukung perkantoran	0	15	15	15	100%	10	40	571%
3.04.3.04.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	0	12	5	5	100%	5	22	314%
3.04.3.04.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0	50	300	200	67%	250	500	55,55 %
3.04.3.04.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	15	250	230	92%	50	295	178%
3.04.3.04.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	0	50	100	100	100%	90	240	70,59%
3.04.3.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	500 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
3.04.3.04.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	0%
3.04.3.04.01.01.02.11	Penyewaan Rumah/Gedung Parkiran Kantor Dinas	Jumlah unit yang di sewa	0	2	1	1	100%	0.01	3.01	100%
3.04.3.04.01.01.02.13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	0	0	25	25	100%	9	34	136%

3.04.3.04.01.01.02.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3.04.3.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	60 %	20%	10%	10%	100%	10%	40%	67%
3.04.3.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		0	5	2	40%	7	9	75%
3.04.3.04.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	45%	37%	2%	2%	100%	2%	41%	91%
3.04.3.04.01.15.19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	0	20	0	0	0%	0	20	14,49%
3.04.3.04.01.15.20	Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran	0	0	3	3	100%	0	3	100%
3.04.3.04.01.15.23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0	32	0	0	0%	0	32	91,43%
3.04.3.04.01.15.36	Peningkatan kualitas pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Jumlah unit yang diadakan	0	0	1	1	100%	0	1	100%
3.04.3.04.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	55 %	47%	2%	2%	100%	2%	0.51	93%
3.04.3.04.01.16.02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Jumlah bibit/benih tanaman kehutanan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3.04.3.04.01.16.10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	0	0	18	18	100%	0	18	13,64%
3.04.3.04.01.22	Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan	Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya	56%	0%	56%	56%	100%	0%	0	0%
3.04.3.04.01.22.02	Penyediaan Data Spasial dan Numerik	Jumlah data spasial dan numerik	0	0	1	1	100%	0	0	0%
3.04.3.04.01.23	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (social forestry)	Persentase Partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan	50%	0%	50%	50%	100%	0%	0.5	100%
3.04.3.04.01.23.01	Pengembangan usaha masyarakat desa di sekitar hutan	Jumlah desa yang mendapatkan pengembangan masyarakat Desa disekitar Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0%
3.04.3.04.01.23.03	Pengembangan agroforestry/agrosilvapastura	Luasan agrosilvo pastura dan agroforestry	0	0	1	0	0	0%	0	0%
3.04.3.04.01.23.05	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	0	0	5	5	100%	0	5	500%
3.04.3.04.01.28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	persentase cakupan layanan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	60%	0	0	0	0%	60%	0.6	100%
3.04.3.04.01.28.01	Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah unit sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	0	0%	44	44	100%
3.04.3.04.01.28.02	Peningkatan sistem kemitraan pada masyarakat peduli api	Jumlah kegiatan sistem kemitraan pada masyarakat peduli api	0	0	0	0	0%	3	3	100%
3.04.3.04.01.28.03	Penerapan agroforestry, agrosilvo pastura dan kegiatan sejenisnya	Luasan agrosilvo pastura dan agroforestry	0	0	0	0	0%	40	40	100%
3.04.3.04.01.28.04	Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran	0	0	0	0	0%	24	24	100%
3.04.3.04.01.28.11	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan kampanye	0	0	0	0	0%	3	3	100%
3.04.3.04.01.29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Persentase realisasi kegiatan perlindungan dan Pengamanan Hutan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	1	100%
3.04.3.04.01.29.01	Patroli pengamanan	Jumlah Patroli Pengamanan	0	0	0	0	0%	20	20	100%
3.04.3.04.01.30	Program Pengembangan Perbenihan	Persentase capaian kegiatan Pengembangan Perbenihan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	1	100%
3.04.3.04.01.30.04	Pembuatan/pengadaan bibit	Jumlah bibit atau unit yang diadakan	0	0	0	0	0%	20	20	100%

3.04.3.04.01.32	Program Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase capaian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	1	100%
3.04.3.04.01.32.01	Pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah usaha PS yang dikembangkan	0	0	0	0	0%	1	1	100%
3.04.3.04.01.35	Program Biaya Operasional KPH	Persentase realisasi operasional KPH	100%	0%	0%	0%	0%	100%	1	100%
3.04.3.04.01.35.01	Tata Hutan dan Perencanaan	Jumlah dokumen kegiatan tata hutan dan perencanaan	0	0	0	0	0%	1	1	100%

SIPD 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12	100%
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	31 pcs	0	0	0	0	31 pcs	31	100%
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	0	0	0	0	5 orang	5	100%
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik	10 unit	0	0	0	0	12 bulan	5	42%
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	0	0	0	0	12 bulan	5	42%
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1	100%
3.28.01.1.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan bahan Logistik Kantor	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12	100%
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12	100%
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 kali	0	0	0	0	150 kali	150	100%
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan mebel	3 unit	0	0	0	0	3 unit	3	100%
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	100 lembar	0	0	0	0	100 lembar	100	100%
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12	100%
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 unit	0	0	0	0	11 unit	11	100%
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12	100%

3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	22 unit	0	0	0	0	22 unit	22	100%
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung/kantor yang disewa	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1	100%
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan									
3.28.03.1.01	Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	5	100%
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Jumlah KPH yang dikelola	1 KPH	0	0	0	0	1 KPH	12	100%
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)									
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	12	100%
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara									
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit persemaian yang dibangun/dipelihara	1 unit	0	0	0	0	1 unit	12	100%
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan	10 kali	0	0	0	0	10 kali	12	100%
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan	12 kali	0	0	0	0	12 kali	12	100%
3.28.03.1.05.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	12 kali	0	0	0	0	12 kali	12	100%
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam									
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibantu Alat Ekonomi Produktif	4 Kelompok	0	0	0	0	4 Kelompok	4	100%
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah unit PS yang terbentuk	10 KUPS	0	0	0	0	10 KUPS	10	100%

Dari hasil evaluasi renja diatas dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja tahun 2020 pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 68,80% yang dikategorikan Sedang. Berdasarkan laporan program dan kegiatan tahun 2020 untuk realisasi fisik sebesar 82,88 % dan realisasi keuangan sebesar 69,92. Hal ini karena ada beberapa program kegiatan yang capaiannya rendah. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Pengelolaan DAS
Kegiatan Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) (0%)
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain lain (0%)
3. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Kegiatan Sosialisasi (50%)
4. Program Pengembangan Perbenihan
Kegiatan Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan (0%)

Beberapa hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih belum optimal.
2. Ada kegiatan yang mengalami refocusing anggaran sehingga target yang diharapkan tidak tercapai.
3. Karena adanya musibah pandemi virus corona yang melanda Indonesia maupun dunia sehingga ada beberapa kegiatan dalam bentuk pertemuan yang tidak dapat dilakukan secara optimal.

Kebijakan atau tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor tersebut adalah :

1. Melakukan pembagian tugas kepada seluruh staf Dinas Kehutanan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal
2. Melakukan penjadwalan ulang program kegiatan agar dapat memilah kegiatan mana yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak.
3. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 merupakan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2021 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang

dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan kawasan hutan agar berfungsi optimal sesuai peruntukannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Pembangunan kehutanan Tahun 2020 menekankan pada upaya pengamanan dan perlindungan hutan serta mitigasi perubahan iklim, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil hutan. Keempat fokus tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Kalimantan Utara yang terdapat dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Kehutanan Tahun 2017-2021.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2020 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bersumber Anggaran dari APBD digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2021.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 berhasil mencapai sasaran yaitu sebesar 72,85%. Kinerja tersebut telah diukur melalui perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1.7 Tabel Capaian Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	702.851,32 M3	742.877,57 M3	105,69
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5 %	5,61 %	112,18
3.	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	1. Persentase menurunnya lahan kritis 2. Persentase Luas Lahan	2 % 3 %	0,94 % 0,80 %	46,90 26,63

		Yang Terkelola			
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun					72,85

Dari hasil pengukuran kinerja di atas terdapat capaian kinerja dibawah target yaitu : Persentase menurunnya lahan kritis dan Persentase Luas Lahan yang terkelola, hal ini disebabkan karena beberapa hal :

1. Dalam pelaksanaan hutan dan lahan, lokasi atau daerah lahan kritis yang ada diwilayah provinsi Kalimantan Utara sulit dijangkau dan sangat luas sehingga pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kurang maksimal
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan hutan masih kurang maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berikut.

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	-	-	702.851,32 M ³	725.295,68 M ³	-	-	105,69%	100%	-	-	
2	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	-	-	5%	5%	5%	5%	112,18%	100%	100%	100%	
3	Persentase menurunnya lahan kritis	-	-	2%	2%	2%	2%	46,90%	100%	100%	100%	
4	Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	-	-	5%	3%	-	-	26,66%	100%	-	-	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 secara umum telah tercapai sekitar 72,85%, tetapi secara terpisah ada 2 indikator sasaran yang belum tercapai yaitu persentase menurunnya lahan kritis dan persentase luas lahan yang terkelola, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penanaman yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dan pengelolaan kawasan masih belum maksimal.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- c. Lemahnya Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui perhutanan sosial;
- e. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan;
- f. Belum tersedianya data dan informasi kehutanan secara lengkap, akurat, dan kontinyu
- g. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi;
- h. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan maka beberapa hal yang menjadi tantangan, antara lain :

- Kurangnya kepastian dan perlindungan hukum dalam dunia usaha khususnya perizinan terhadap investor disebabkan belum adanya pengukuhan status kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

- Pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami perlambatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga akan mempengaruhi pelayanan.
- Mitigasi Iklim mempengaruhi siklus tanam petani dan meningkatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan semakin meninggi.
- Adanya masalah konflik pemanfaatan kawasan hutan

Dalam menghadapi tantangan tersebut terdapat peluang, antara lain :

- Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki peluang pasar produk kehutanan seiring dengan meningkatnya sarana prasarana informasi.
- Hutan Kalimantan Utara masuk dalam Heart Of Borneo sehingga memiliki nilai jual di dunia internasional.

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor kehutanan maka Dinas Kehutanan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kehutanan dalam arti luas.

Tabel 2.3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan			
	Meningkatnya Produksi Hutan	Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan - Mendukung program Pusat dalam peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemanfaatan kawasan hutan - Implementasi peningkatan produktivitas hutan
		Kebijakan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten - Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan rescue (penyelamatan)
		Optimalisasi Pengelolaan Kelembagaan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan secara aktif perusahaan pemegang izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan dan berbagai lembaga non-formal dari unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan - Melakukan penelitian/kajian luas kawasan optimal suatu unit manajemen (KPH atau bentuk lainnya) atau sub-unit manajemen hutan (pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau izin pinjam pakai) untuk seluruh fungsi hutan di Kaltara

	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi aktif parapihak, seperti pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pemilik lahan (termasuk masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dengan pola insentif yang dapat diberikan - Kesesuaian jenis pohon dengan kondisi tempat tumbuh, fungsi hutan, rencana tata ruang, dan juga tujuan tertentu yang telah didisain untuk suatu kegiatan RHL - Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas
		Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya
		Pembaharuan Sistem Kehutanan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan serta Monev Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan pemantauan SDH - Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Penguatan Kelembagaan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kehutanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kapasitas SDM kehutanan daerah - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan - Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan
		Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan - Areal/lokasi yang telah dicadangkan implementasi skema-skema pemberdayaan masyarakat, baik di dalam kawasan maupun di luar

			kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan (segala fungsi hutan);
--	--	--	--

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100%		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	5 Dokumen		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	5 Dokumen		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	210,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	210,000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen DPA	2 Dokumen	315,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen DPA	2 Dokumen	315,000	
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen dan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	285,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen dan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	285,000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi keuangan kantor	100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi keuangan kantor	100%		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	19,210,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	19,210,000	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	20,250,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	20,250,000	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Kantor	40%		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Kantor	40%		
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/diklat	20 Orang	1,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	1,500,000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tanjung Selor	Jumlah komponen listrik	30 Unit	11,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tanjung Selor	Jumlah komponen listrik	30 Unit	11,000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	44 Unit	365,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	44 Unit	365,000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	196,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	196,000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	53,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	53,000	

e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanjung Selor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	180 Porsi	26,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanjung Selor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	180 Porsi	26,000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	125 Kali	1,100,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	125 Kali	1,100,000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan	1 Unit		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan	1 Unit		
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah Gedung/Kantor yang dibangun	1 Unit	1,088,888	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah Gedung/Kantor yang dibangun	1 Unit	1,088,888	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	33		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Surat yang dikirim	200 Surat	15,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Surat yang dikirim	200 Surat	15,000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	87,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	87,000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Unit	50,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Unit	50,000	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,180,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,180,000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang yang terpelihara	100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang yang terpelihara	100%		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	48 Unit	180,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	48 Unit	180,000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Kab/Kota	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Kab/Kota	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	250,000	

B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2%		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2%		
1	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH	10%		Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH	10%		
a	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	5 Kab/Kota	Jumlah KPH yang dilakukan tata batas	5 KPH	2,700,000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	5 Kab/Kota	Jumlah KPH yang telah melaksanakan tata batas pembagian Blok/Petak	5 KPH	2,700,000	
b	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi	5 Kab/Kota	Jumlah KPH yang dikelola	5 KPH	20,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi	5 Kab/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Operasional	10 Unit	20,000,000	
2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah KPH yang terkelola	2 Unit		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah KPH yang terkelola			
a	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen RPHJP	1 Dokumen	600,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RPHJP	2 Dokumen	600,000	
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Unit Manajemen yang terbina	30%		Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Unit Manajemen yang terbina	30%		
a	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	5 Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Usaha Kehutanan	1 dokumen	300,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	5 Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Usaha Kehutanan	1 dokumen	300,000	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	5 Kab/Kota	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	11 Unit	405,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	5 Kab/Kota	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	11 Unit	405,000	
4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun		Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina	80%		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun		Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina	80%		
a	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M³/Tahun	Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Bulungan	Jumlah Dokumen/Rekomendasi	10 Dokumen/Rekomendasi	300,000,000	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M³/Tahun	Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Bulungan	Jumlah Dokumen/Rekomendasi	10 Dokumen/Rekomendasi	300,000,000	
b	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 M³/Tahun melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Nunukan	Jumlah Izin yang terbit	5 Izin	500,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 M³/Tahun melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Nunukan	Jumlah Izin yang terbit	5 Izin	500,000,000	
5	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Kab/Kota	Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis	2%		Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis	2%		

a	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Kab/Kota	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	50 ha%	1,500,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Kab/Kota	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	50 ha%	1,500,000	
b	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	Luas Penghijauan Lingkungan	200 Ha	3,000,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	Luas Penghijauan Lingkungan	200 Ha	3,000,000	
c	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kota Tarakan	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	5 Unit	500,000,000	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kota Tarakan	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	5 Unit	500,000,000	
d	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	3 Unit	6,000,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	3 Unit	6,000,000	
e	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Bulungan	Jumlah Ijin Usaha dalam pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30 Ijin Usaha	420,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Bulungan	Jumlah Ijin Usaha dalam pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30 Ijin Usaha	420,000	
6	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	1%		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	1%		
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Kab/Kota	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	110 Kali	2,710,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Kab/Kota	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	110 Kali	2,710,000	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kab/Kota	Persentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan	0,8%	13,750,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kab/Kota	Persentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan	0,8%	13,750,000	
7	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	10.000 batang							
a	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	jumlah pengada dan pengedar bibit tanaman yang bersertifikat	5 Penyedia	250,000,000	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	jumlah pengada dan pengedar bibit tanaman yang bersertifikat	5 Penyedia	250,000,000	
b	Sertifikasi Sumber Benih	Kab. Bulungan dan Kab. Malinau	Jumlah Sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	10.000 Batang	400,000,000	Sertifikasi Sumber Benih	Kab. Bulungan dan Kab. Malinau	Jumlah Sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	10.000 Batang	400,000,000	
c	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah peredaran benih/bibit yang bersertifikat	10.000 Batang	350,000,000	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah peredaran benih/bibit yang bersertifikat	10.000 Batang	350,000,000	

C	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		persentase kawasan yang dikelola	10%		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		persentase kawasan dikelola	10%		
1	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah Kawasan yang dikelola	1 Kawasan		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah Kawasan yang dikelola	1 Kawasan		
a	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Nunukan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	200,000	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Nunukan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	200,000	
b	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	300,000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	300,000	
c	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Bulungan-KTT	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	600,000	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Bulungan-KTT	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	600,000	
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Peningkatan jumlah kelompok usaha masyarakat	20%		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Peningkatan jumlah kelompok usaha masyarakat	20%		
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Masyarakat Yang Terbina dalam Kawasan Hutan	5%		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Masyarakat Yang Terbina dalam Kawasan Hutan	5%		
a	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	5 Kab/Kota	Jumlah metode dan materi	3 Metode/ Materi	2,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	5 Kab/Kota	Jumlah Peningkatan SDM Penyuluh	15 Orang	2,000,000	
b	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	5 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Unit Usaha yang dikembangkan	20 KUPS	15,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	5 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Unit Usaha yang dikembangkan	20 Unit	15,000,000	
c	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah Perhutanan Sosial yang terbentuk	20 Unit	3,850,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah Perhutanan Sosial yang terbentuk	2 Unit	3,850,000	
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase DAS yang terkelola	10%		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase DAS yang terkelola	10%		
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS		Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS		

a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Kab.Nunukan, KTT dan Kab. Malinau	Jumlah Dokumen RPDAS	1 Dokumen	1,500,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS		Jumlah Dokumen RPDAS	1 Dokmen	1,500,000	
b	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah bangunan Stasiun Pengamat Arus Sungai(SPAS)	5 Unit	2,000,000	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah bangunan Stasiun Pengamat Arus Sungai(SPAS)	5 Unit	2,000,000	
c	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air	5 Unit	1,000,000	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air	5 Unit	1,000,000	
d	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan DAS	5 Kelompok	750,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan DAS	5 Kelompok	750,000,000	
e	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Kab. Bulungan	Jumlah kelembagaan dalam pengelolaan DAS	1 unit	350,000,000	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Kab. Bulungan	Jumlah kelembagaan dalam pengelolaan	1 unit	350,000,000	
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	5 Kali	500,000,000	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	5 Kali	500,000,000	

Tabel 2.4.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan UPTD KPH Tana Tidung 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100%		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi keuangan kantor			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi keuangan kantor			
a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 bulan	171,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 bulan	171,000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tana Tidung	Jumlah pakaian dinas beserta	4 steel	4,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tana Tidung	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	4 steel	4,000,000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar & Dalam Provinsi Kaltara	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	10 orang	100,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar & Dalam Provinsi Kaltara	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	10 orang	100,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Bulan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	2,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Bulankomponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	2,000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulanperalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	50,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulanperalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	50,000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tana Tidung	Jumlah unit peralatan rumah tangga	1 unit	6,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tana Tidung	Jumlah unit peralatan rumah tangga	1 unit	6,000	
d	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	20,000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	20,000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 bulan	14,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	14,000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Daerah	150 kali	450,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Daerah	150 kali	450,000	
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Tidung	Jumlah makanan dan minuman yang	50 porsi	10,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Tidung	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	50 porsi	10,000	

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintsh Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintsh Daerah	100%		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah surat yang dikirim	100 lembar	6,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah surat yang dikirim	100 lembar	6,000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 bulan	55,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	55,000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 unit	8,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 unit	8,000	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	215,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	215,000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang yang terpelihara	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang yang terpelihara	100%		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Tidung	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22 unit	124,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Tidung	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22 unit	124,000	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tana Tidung	Jumlah Unit gedung/kantor	1 unit	100,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tana Tidung	Jumlah Unit gedung/kantor	1 unit	100,000	
B	Program Pengelolaan Hutan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2%		Program Pengelolaan Hutan					
1	Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					
a	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tana Tidung	Jumlah unit KPH yang disusun rancang bangun tata hutan wilayahnya	2 Unit KPH	350,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tana Tidung	Jumlah unit KPH yang disusun rancang bangun tata hutan wilayahnya	2 Unit KPH	350,000	
b	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tana Tidung	Jumlah dokumen RPHJP	1 dokumen	235,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tana Tidung	Jumlah dokumen RPHJP	1 dokumen	235,000	
c	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tana Tidung	Jumlah KPH yang dilakukan tata batas	1 KPH	210,000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Tana Tidung	Jumlah KPH yang dilakukan tata batas	1 KPH	210,000	

d	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Tana Tidung	Jumlah KPH yang dikelola	1 KPH	3,500,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Tana Tidung	Jumlah KPH yang dikelola	1 KPH	3,500,000	
e	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu/atau Jasa Lingkungan	Tana Tidung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	8 Unit	320,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu/atau Jasa Lingkungan	Tana Tidung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	8 Unit	320,000	
f	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tana Tidung	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan	24 Kali	850,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tana Tidung	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan	24 Kali	850,000	
g	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Tana Tidung	Terlaksananya Pengendalian Hutan	24 Kali	350,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Tana Tidung	Terlaksananya Pengendalian Hutan	24 Kali	350,000	
h	Perbenihan Tanaman Hutan	Tana Tidung	Tersedia Bibit Tanaman	10.000 Batang	520,000	Perbenihan Tanaman Hutan	Tana Tidung	Tersedia Bibit Tanaman	10.000 Batang	520,000	
i	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Tana Tidung	Jumlah unit persemaian yang	1 Unit	450,000	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Tana Tidung	Jumlah unit persemaian yang dibangun/dipelihara	1 Unit	450,000	
j	Sertifikasi Mutu Bibit	Tana Tidung	Jumlah sumber benih yang bersertifikat	10.000 Batang	180,000	Sertifikasi Mutu Bibit	Tana Tidung	Jumlah sumber benih yang bersertifikat	10.000 Batang	180,000	
C	Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Tana Tidung	Jumlah metode dan materi penyuluhan yang dibuat	1 metode	300,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Tana Tidung	Jumlah metode dan materi penyuluhan yang dibuat	1 metode	300,000	
2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Tana Tidung	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	8 KUPS	345,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Tana Tidung	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	8 KUPS	345,000	
3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tana Tidung	Jumlah unit PS yang terbentuk	10 unit	435,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tana Tidung	Jumlah unit PS yang terbentuk	10 unit	435,000	
D	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai					Pengelolaan Daerah Aliran Sungai					
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Tana Tidung	Jumlah kelompok masyarakat Pengelolaan DAS	1 kelompok	550,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Tana Tidung	Jumlah kelompok masyarakat Pengelolaan DAS	1 kelompok	550,000	
2	Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan DAS	Tana Tidung	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	12 kali	410,000	Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan DAS	Tana Tidung	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	12 kali	410,000	

Tabel 2.4.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan UPTD KPH Malinau 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah			
a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Malinau	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 Bulan	150,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Malinau	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 Bulan	150,000,000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah			
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Malinau	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	37	29,600,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Malinau	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	37	29,600,000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar & Dalam Provinsi Kaltara	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	5	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar & Dalam Provinsi Kaltara	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	5	50,000,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Daerah			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malinau	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malinau	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	6,000,000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	20,000,000	
c	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	60,000,000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000	

e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Malinau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100 Porsi	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Malinau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100 Porsi	20,000,000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Kali	450,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Kali	450,000,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malinau	Jumlah surat yang dikirim	500	15,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malinau	Jumlah surat yang dikirim	500	15,000,000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Malinau	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Malinau	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40,000,000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	20,000,000	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malinau	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	250,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malinau	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	250,000,000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Yang Terpelihara			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Yang Terpelihara			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan	1	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan	1	50,000,000	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malinau	Jumlah Unit yang direhabilitasi	1	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malinau	Jumlah Gedung/Kantor yang direhab	1	200,000,000	

B	Program Pengelolaan Hutan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			Program Pengelolaan Hutan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional KPH			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional KPH			
a	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Malinau	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Saprass Operasional KPH	1 Keg	1,817,500,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Malinau	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Saprass Operasional KPH	1 Keg	1,817,500,000	
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
a	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Malinau	Berkurangnya kerusakan hutan akibat perambahan perambahan	2 Keg	750,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Malinau	Berkurangnya kerusakan hutan akibat perambahan perambahan	2 Keg	750,000,000	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Malinau	Jumlah Patroli	0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Malinau	Jumlah Patroli	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Malinau	Jumlah Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Keg	3,300,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Malinau	Persentase berkurangnya luasan karhutla dalam kawasan hutan	6 Keg	3,300,000,000	
C	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										
a	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Malinau	Jumlah kegiatan tata hutan dan perencanaan RPHJP & RPHJPD	2 Dok	1,000,000,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Malinau	Jumlah kegiatan tata hutan dan perencanaan RPHJP & RPHJPD	2 Dok	1,000,000,000	

2	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					
a	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani	Malinau	umlah Peluang Promosi diKPI	1 Keg	500,000,000	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani	Malinau	umlah Peluang Promosi diKPI	1 Keg	500,000,000	
b	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasling	Malinau	Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari	1 Keg	250,000,000	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasling	Malinau	Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari	1 Keg	250,000,000	
3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Persentase Luas Tutupan lahan bertambah dari keg. Rehabilitasi & Luas Lahan Kritis berkurang			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Persentase Luas Tutupan lahan bertambah dari keg. Rehabilitasi & Luas Lahan Kritis berkurang			
a	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Malinau	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dok	300,000,000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Malinau	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dok	300,000,000	
b	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Malinau	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	50 Ha	500,000,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Malinau	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	50 Ha	500,000,000	
c	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Malinau	umlah Lahan yang direhabitas	50 Ha	500,000,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Malinau	umlah Lahan yang direhabitas	50 Ha	500,000,000	
4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					Perbenihan Tanaman Hutan					
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Malinau	Persentasi peningkatan PNPB dan tertibnya peredaran hasil hutan	1 Keg	250,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Malinau	Persentasi peningkatan PNPB dan tertibnya peredaran hasil hutan	1 Keg	250,000,000	

	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah Ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat & sesuai Standar			Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah Ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat & sesuai Standar			
1	Sertifikasi Mutu Bibit	Malinau	Jumlah bibit disediakan	20.000 Btg	300,000,000	Sertifikasi Mutu Bibit	Malinau	Jumlah bibit disediakan	20.000 Btg	300,000,000	
C	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		Persentase Peningkatan jumlah Kelompok usaha masyarakat			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		Persentase Peningkatan jumlah Kelompok usaha masyarakat			
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Masyarakat yang terbina didalam kawasan hutan			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Masyarakat yang terbina didalam kawasan hutan			
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luar Prov. Kaltara	Tersedianya Penyuluh yang Kompeten	25 Orang	400,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luar Prov. Kaltara	Tersedianya Penyuluh yang Kompeten	25 Orang	400,000,000	
2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Malinau	Tersedianya Kelompok Sasaran yang Mandiri	5 Kelompok	200,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Malinau	Tersedianya Kelompok Sasaran yang Mandiri	5 Kelompok	200,000,000	
3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Malinau	Tersedianya Kelompok Perhutanan Sosial	5 Kelompok	200,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Malinau	Tersedianya Kelompok Perhutanan Sosial	5 Kelompok	200,000,000	

Tabel 2.4.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan UPTD KPH Bulungan 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulungan	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 bulan	171,416,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulungan	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 bulan	250,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bulungan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bulungan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	20 Stel	25,000,000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar & Dalam Provinsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar & Dalam Provinsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	12 Orang	80,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulungan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulungan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	2,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulungan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	140,541,834	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulungan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	50,000,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulungan	Jumlah taersedianya peralatan rumah tangga	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulungan	Jumlah taersedianya peralatan rumah tangga	2 unit	12,000,000	
4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bulungan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	42,752,799	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bulungan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	20,000,000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulungan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	11,537,615	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulungan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	14,000,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dalam & Luar Daerah	150 kali	221,923,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dalam & Luar Daerah	150 kali	450,000,000	

7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulungan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	200 Porsi	24,996,050	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulungan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	500 porsi	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulungan	Jumlah surat yang dikirim	800 lembar	13,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulungan	Jumlah surat yang dikirim	1500 lembar	15,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulungan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	32,103,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulungan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	55,000,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulungan	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	11 unit	7,590,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulungan	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	8,000,000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulungan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	132,168,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulungan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	215,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan	1 Tahun	146,680,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan	22 unit	180,000,000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulungan	Jumlah Unit gedung/kantor yang disewa	1 unit	175,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulungan	Jumlah Gedung/Kantor yang direhab	1 unit	175,000,000	
B	Program Pengelolaan Hutan					Program Pengelolaan Hutan					
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Dokumen yang di Hasilkan			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)					
1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Bulungan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH			Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Bulungan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH	12 Bulan	200,000,000	DBH
2	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Bulungan	Terlaksananya Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Bulungan	Terlaksananya Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu	12 bulan	350,000,000	DBH
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan					

1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Bulungan	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan	44 Unit	258,762,465	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Bulungan	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan	12 Bulan	2,000,000,000	DBH
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Bulungan	Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi perlindungan Hutan			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Bulungan	Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi perlindungan Hutan	100 Kali	300,000,000	DBH
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Bulungan	Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi perlindungan Hutan			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Bulungan	Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi perlindungan Hutan	150 Kali	350,000,000	DBH
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka					
1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Bulungan	Tersedianya Dokumen			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Bulungan	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	DBH
2	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Bulungan	Tesedianya Bibit Tanaman			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Bulungan	Tesedianya Bibit Tanaman	1 Dokumen	800,000,000	DBH
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		Tersedianya Data dan Informasi Kehutanan			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bulungan	Tersedianya Data dan Informasi Kehutanan	2 Dokumen	400,000,000	DBH
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bulungan	Tersedianya Data dan Informasi Kehutanan			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bulungan	Tersedianya Data dan Informasi Kehutanan	2 Dokumen	400,000,000	DBH
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Bulungan	Terlaksananya Pengendalian Hutan			
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Bulungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional KPH	22 Unit	62,857,712	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Bulungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional KPH	120 Unit	4,500,000,000	DBH

2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Bulungan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH	11 Unit	182,556,168	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Bulungan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH	12 Bulan	300,000,000	DBH
3	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Bulungan	Terlaksananya Penataan Kawasan Hutan	2 Dokumen	172,713,488	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Bulungan	Terlaksananya Penataan Kawasan Hutan	4 Dokumen	250,000,000	DBH
	Perbenihan Tanaman Hutan					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan	Bulungan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat			
1	Sertifikasi Sumber Benih	Bulungan	Tersedianya Sertifikasi Bibit Tanaman			Sertifikasi Sumber Benih	Bulungan	Tersedianya Sertifikasi Bibit Tanaman	12 Bulan	1,500,000,000	DBH
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					Sertifikasi Mutu Bibit	Bulungan	Tersedianya Tenaga Sertifikasi Bibit Tanaman			
1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Bulungan	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Bulungan	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan	5 KTH	500,000,000	DBH
2	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Bulungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha ekonomi Produktif			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Bulungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha ekonomi Produktif	9 KUPS	1,800,000,000	DBH
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Bulungan	Adanya Diklat /Sosialisasi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Bulungan	Adanya Diklat /Sosialisasi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	8 orang	150,000,000	DBH

Tabel 2.4.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan UPTD KPH Tarakan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Layanan Administrasi Keuangan Kantor	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Layanan Administrasi Keuangan Kantor	100%		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Rp 600,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Rp 600,000.00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah Komponen Listrik	12 Bulan	Rp 5,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah Komponen Listrik	12 Bulan	Rp 5,000.00	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	Rp 70,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	Rp 70,000.00	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp 15,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp 15,000.00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Bahan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	Rp 2,500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Bahan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	Rp 2,500.00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 eksemplar	Rp 2,300.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 Eksempla	Rp 2,300.00	
9	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tarakan	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	100 Porsi	Rp 6,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tarakan	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	100 Porsi	Rp 6,000.00	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	100 Kali dan 150 Porsi	Rp 105,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	100 Kali dan 150 Porsi	Rp 105,000.00	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%		
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Surat yang Dikirim	500 Lembar	Rp 6,500.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Surat yang Dikirim	500 Lembar	Rp 6,500.00	

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tarakan	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	Rp 60,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tarakan	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	Rp 60,000.00	
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Rp 5,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Rp 5,000.00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp 200,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp 200,000.00	
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Barang yang Terpelihara	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Barang yang Terpelihara	100%		
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	20 Unit	Rp 100,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	20 Unit	Rp 100,000.00	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	1 Unit	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	1 Unit	Rp -	
B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					
2	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kegiatan Tata Hutan, Perencanaan RPHJP, dan RPHJPD	2 Dokumen	Rp 60,000.00	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Kegiatan Tata Hutan, Perencanaan RPHJP, dan RPHJPD	2 Dokumen	Rp 60,000,000.00	
3	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tarakan	Jumlah Batas Blok yang Diukur	10 Km	Rp 200,000.00	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Batas Blok yang Diukur	10 Km	Rp 200,000,000.00	

4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tarakan dan Delta Kayan	Tersedianya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	40 Unit	Rp 2,000,000.00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Tersedianya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	40 Unit	Rp 2,000,000,000.00	
5	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					
6	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi Kaltara	Jumlah Peluang Promosi KPH	2 Kegiatan	Rp 150,000.00	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutan		Jumlah Peluang Promosi KPH	2 Kegiatan	Rp 150,000.00	
7	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
8	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen	Rp 100,000.00	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen	Rp 100,000.00	
9	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tarakan	Jumlah Persemaian Permanen	1 Unit	Rp 600,000.00	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Persemaian Permanen	1 Unit	Rp 600,000.00	
10	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tarakan	Jumlah Luasan Lahan yang Direhabilitasi	10 Ha	Rp 300,000.00	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Jumlah Luasan Lahan yang Direhabilitasi	10 Ha	Rp 300,000.00	
11	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
12	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	10 Kali	Rp 100,000.00	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	10 Kali	Rp 100,000.00	
13	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan	24 Kali	Rp 500,000.00	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan	24 Kali	Rp 500,000.00	
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi Kaltara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Kegiatan	Rp 200,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Kegiatan	Rp 200,000.00	

15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kegiatan	Rp 1,500,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kegiatan	Rp 1,500,000,000.00	
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					
2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi Kaltara	Tersedianya Penyuluh dan SDM Bidang Kehutanan yang Kompeten	10 Orang	Rp 200,000.00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Tersedianya Penyuluh dan SDM Bidang Kehutanan yang Kompeten	10 Orang	Rp 200,000.00	
3	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Tersedianya Kelompok Sasaran yang Mandiri	10 Kelompok	Rp 150,000.00	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Tersedianya Kelompok Sasaran yang Mandiri	10 Kelompok	Rp 150,000.00	
4	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tarakan dan Delta Kayan	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5 Kegiatan	Rp 800,000.00	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5 Kegiatan	Rp 800,000.00	

Tabel 2.4.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan UPTD KPH Nunukan 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Kantor	100%		Administrasi Keuangan perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Kantor			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nunukan	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	250,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nunukan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	300,000	
	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Kantor	100%		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Kantor			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50 Stel	50,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50 Stel	50,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nunukan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	100,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nunukan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	100,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Gedung Kantor	Nunukan	jumlah komponen listrik	50 unit	6,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Gedung Kantor	Nunukan	jumlah komponen listrik	50 unit	7,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	20,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	100,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga	5 unit	65,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga	5 unit	100,000	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Nunukan	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	100,000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Nunukan	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	100,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nunukan	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	500 porsi	25,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nunukan	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	500 porsi	25,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	70 Kali	450,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	70 kali	450,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nunukan	Jumlah surat yang dikirim	100 surat	17,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nunukan	Jumlah surat yang dikirim	100 surat	20,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	70,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	80,000	
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Unit	25,000	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Unit	25,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Nunukan	Jumlah Pelayanan Umum Kantor kantor yang dipelihara	12 Bulan	300,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Nunukan	Jumlah Pelayanan Umum Kantor kantor yang dipelihara	12 Bulan	325,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang yang terpelihara	48 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang yang terpelihara			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 unit	25,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 Unit	30,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40 Unit	100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40 Unit	125,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Unit	180,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	170,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Unit	180,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	200,000	
	Program Pengelolaan Hutan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2%		Program Pengelolaan Hutan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH	10%		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	UPTD KPH Nunukan	Jumlah KPH yang dikelola	1 KPH	4,700,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	UPTD KPH Nunukan	Jumlah KPH yang dikelola	1 KPH	2,500,000	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah KPH yang dikelola	4 Dokumen		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah KPH yang dikelola			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	Jumlah Dokumen RPHJP	4 Dokumen	1,500,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	Jumlah Dokumen RPHJP	3 Dokumen	300,000	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan lindung		Persentase Unit Manajemen yang terbina	100%		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan lindung		Persentase Unit Manajemen yang terbina			
	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	Unit IV (Nunukan)	Dokumen Informasi Usaha Kehutanan	1 Dokumen	100,000	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	Unit IV (Nunukan)	Dokumen Informasi Usaha Kehutanan	1 Dokumen	150,000	
	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	Unit IV (Nunukan)	jumlah dokumen potensi usaha di kawasan hutan lindung	1 Dokumen	100,000	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	Unit IV (Nunukan)	jumlah dokumen potensi usaha di kawasan hutan lindung	1 Dokumen	150,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Unit IV (Nunukan)	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	8 Unit	75,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Unit IV (Nunukan)	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	8 Unit	75,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	Unit IV (Nunukan)	jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	5 ijin Usaha	60,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	Unit IV (Nunukan)	jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	5 ijin Usaha	60,000	
	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan	UPTD KPH Nunukan	jumlah kelompok tani hutan/masyarakat sekitar/ didalam kawasan hutan yang mendapat bantuan	15 Kelompok	1,500,000	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan	UPTD KPH Nunukan	jumlah kelompok tani hutan/masyarakat sekitar/ didalam kawasan hutan yang mendapat bantuan	15 Kelompok	1,500,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara		Persentase Luas tutupan lahan bertambah dari kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis berkurang	2%		Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara		Persentase Luas tutupan lahan bertambah dari kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis berkurang			
	Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)	Unit IV (Nunukan)	jumlah dokumen RTnRL	1 Dokumen	500,000	Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)	Unit IV (Nunukan)	jumlah dokumen RTnRL	1 Dokumen	500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Pulau Nunukan dan Sebatik	Luas Penghijauan Lingkungan	10 Ha	200,000	Pembangunan Penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Pulau Nunukan dan Sebatik	Luas Penghijauan Lingkungan	10 Ha	200,000	
	Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan	Pulau Nunukan dan Sebatik	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	5 Unit	1,200,000	Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan	Pulau Nunukan dan Sebatik	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	4 Unit	1,000,000	
	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Pulau Nunukan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	2 Unit	700,000	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Pulau Nunukan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara			
	Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Unit IV (Nunukan)	Jumlah Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	2 Unit	600,000	Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Unit IV (Nunukan)	Jumlah Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan			
	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan Seimenggaris	Jumlah Ijin Usaha dalam pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	5 ijin Usaha	200,000	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan Seimenggaris	Jumlah Ijin Usaha dalam pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	5 ijin Usaha	200,000	
	Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	1%		Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
	Pencegahan dan Pebatasan Kerusakan Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	jumlah patroli pengamanan hutan	40 Kali	500,000	Pencegahan dan Pebatasan Kerusakan Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	jumlah patroli pengamanan hutan	40 Kali	500,000	
	Pencegahan dan Pebatasan Kerusakan Hasil Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	jumlah patroli pengamanan hutan	25 Kali	200,000	Pencegahan dan Pebatasan Kerusakan Hasil Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	jumlah patroli pengamanan hutan	25 Kali	200,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	15 Kali	500,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	15 Kali	500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	Persentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan	40%	900,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	Persentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan	40%	900,000	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK)		persentase pengelolaan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK)		persentase pengelolaan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH			
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan kayu dengan Tidak mengurangi Fungsi Pokoknya	Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik	jumlah luas lahan agroforestry	15 Ha	600,000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan kayu dengan Tidak mengurangi Fungsi Pokoknya	Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik	jumlah luas lahan agroforestry	15 Ha	600,000	
	Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase peningkatan jumlah kelompok usaha masyarakat	20%		Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase peningkatan jumlah kelompok usaha masyarakat			
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Masyarakat Yang terbina di dalam kawasan hutan	5%		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Masyarakat Yang terbina di dalam kawasan hutan			
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Nunukan	Jumlah metode dan materi penyuluhan yang dibuat	3 Metode/Materi	200,000	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Nunukan	Jumlah metode dan materi penyuluhan yang dibuat	3 Metode/Materi	200,000	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Nunukan, Sebatik, Seimenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi,	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	15 KTH	150,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Nunukan, Sebatik, Seimenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi,	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	15 KTH	150,000	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Nunukan, Sebatik Barat, Seimenggaris, Sembakung, Tulin Onsoi	Jumlah Unit Perhutanan Sosial yang Terbentuk	10 Unit	1,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Nunukan, Sebatik Barat, Seimenggaris, Sembakung, Tulin Onsoi	Jumlah Unit Perhutanan Sosial yang Terbentuk	10 Unit	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2022 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022.

Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat adalah pada tabel berikut.

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Desa Ardi Mulyo	Luas Lahan Mangrove yang ditanam	5 Ha	
		Desa Salim Batu	Luas Lahan Mangrove yang ditanam	5 Ha	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Desa Ardi Mulyo	Luas Lahan Agroforestry	5 Ha	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tarakan	Jumlah KUPS	1 Unit	
		Desa Pimping	Jumlah KUPS	1 Unit	
		Desa Sekatak Buji	Jumlah KUPS	1 Unit	

Tabel 2.5.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

Nomor					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
3	28	03			Program Pengelolaan Hutan	Unit V dan Unit VII			
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Tana Tidung	Tersedia Bibit Tanaman	10.000 Batang	Usulan melalui MusrenbangDes
3	28	03	1.09	05	Sertifikasi Mutu Bibit	Tana Tidung	Jumlah sumber benih yang bersertifikat	10.000 Batang	Usulan melalui MusrenbangDes
3	28	05			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Tana Tidung	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	8 KUPS	Usulan melalui Sosialisasi Bersama Perangkat Desa dan Kecamatan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tana Tidung	Jumlah unit PS yang terbentuk	10 unit	Usulan melalui Sosialisasi Bersama Perangkat Desa dan Kecamatan
					Pengelolaan Daerah Aliran Sungai				
3	28	06	1.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Tana Tidung	Jumlah kelompok masyarakat Pengelolaan DAS	1 kelompok	Usulan melalui Sosialisasi Bersama Perangkat Desa dan Kecamatan

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Presentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan		
2	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Dokumen Kegiatan Tata Hutan, Perencanaan RPHJP, dan RPHJPD	2 Dokumen	
3	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tarakan	Luas Batas Blok yang Diukur	10 Km	
4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Sarana Prasarana Operasional	40 Unit	
5	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				
6	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi Kaltara	Jumlah Peluang Promosi KPH	2 Kegiatan	
7	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
8	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen	
9	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tarakan	Jumlah Persemaian Permanen	1 Unit	
10	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tarakan	Luasan Lahan yang Direhabilitasi	10 Ha	
11	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
12	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	10 Kali	
13	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan	24 Kali	
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi Kaltara	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	2 Kegiatan	
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tarakan dan Delta Kayan	Presentase Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan	5 Kegiatan	
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi Kaltara	Jumlah Peningkatan SDM Penyuluh	10 Orang	
3	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Kelompok Unit Usaha yang Dikembangkan	10 Kelompok	
4	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tarakan dan Delta Kayan	Jumlah Perhutanan Sosial yang Terbentuk	5 Kegiatan	

Tabel 2.5.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
A	Program Pengelolaan Hutan				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				
1	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasling	Malinau	Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari	1 Keg	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
1	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Malinau	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	50 Ha	
B	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Malinau	Tersedianya Kelompok Sasaran yang Mandiri	5 Kelompok	
2	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Malinau	Tersedianya Kelompok Perhutanan Sosial	5 Kelompok	

Tabel 2.5.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah penyediaan jasa Administrasi keuangan	12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Bulungan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	38 Stel	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam & Luar Provinsi Kaltara	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan	12 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulungan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulungan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulungan	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	2 unit	
4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bulungan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulungan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dalam & Luar Daerah	150 kali	
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulungan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	500 porsi	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulungan	Jumlah surat yang dikirim	1500 lembar	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulungan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulungan	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 unit	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulungan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan	22 Unit	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulungan	Jumlah Unit gedung/kantor yang disewa	1 Unit	
B	Program Pengelolaan Hutan				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				
1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Bulungan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH	12 Bulan	
2	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Bulungan	Terlaksananya Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu	12 bulan	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Bulungan	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan	12 Bulan	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Bulungan	Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi perlindungan Hutan	100 Kali	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Bulungan	Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi perlindungan Hutan	150 Kali	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bulungan	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	
2	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Bulungan	Tersedianya Bibit Tanaman	1 Dokumen	
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				
1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bulungan	Tersedianya Data dan Informasi Kehutanan	2 Dokumen	
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Bulungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional KPH	120 Unit	
2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Bulungan	Terselenggaranya Rencana Pengelolaan KPH	12 Bulan	
3	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Bulungan	Terlaksananya Penataan Kawasan Hutan	4 Dokumen	
	Perbenihan Tanaman Hutan				
1	Sertifikasi Sumber Benih	Bulungan	Tersedianya Sertifikasi Bibit Tanaman	12 Bulan	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Bulungan	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan	5 KTH	
2	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Bulungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha ekonomi Produktif	9 KUPS	
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Bulungan	Adanya Diklat /Sosialisasi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	8 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dukungan terhadap prioritas nasional berdasarkan hasil rakortekrenbang selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.1.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Yang Mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Nama Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Lokasi Kegiatan
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	-	-	-	-
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
	Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	-			

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan
			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kab. Nunukan
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Bulungan
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Perbenihan Tanaman Hutan	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung
			Sertifikasi Sumber Benih	Kab. Bulungan dan Kab. Malinau
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Kab. Nunukan, KTT dan Kab. Malinau
			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab.

				Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Kab Bulungan
			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	-	-
	3 Program	5 Kegiatan	19 Sub Kegiatan	

3.1. 2 Telaahan Terhadap Prioritas Provinsi

Visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.

Penjelasan visi tersebut adalah:

1. Provinsi Kalimantan Utara yang BERUBAH adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan

Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.

2. Provinsi Kalimantan Utara yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;

3. Provinsi Kalimantan Utara yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Misi:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya Gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Telaahan terhadap prioritas Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat terhadap 10 prioritas daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dikaitkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2. Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5
1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan	Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Kabupaten Malinau
2. Mewujudkan pembangunan KIPPI	-	-	-	-

3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota.	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.	-	-	-	-
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.	-	-	-	-
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif setiap kabupaten/kota	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan.	-	-	-	-

8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.	-	-	-	-
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab Bulungan, Kota Tarakan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung
	3 Program	4 Kegiatan	9 Sub Kegiatan	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing – masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah sub sector perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor kehutanan dalam arti luas perlu dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah nasional.

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Peningkatan Persentase Hasil Hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5%	5%	5%	5%	5%
			Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	2%	2%	2%	2%	2%
			Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Menurunnya persentase kerusakan hutan	1,2%	1%	0,9%	0,8%	0,7%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2026, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program dan Kegiatan.

Pada Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merencanakan menjalankan 5 Program, 15 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain dari sumber dana tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga mendapat kegiatan dari DBH-DR. Dana DBH-DR masuk kedalam kegiatan yang telah ditentukan oleh perturan perundang-undangan. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan prioritas Perangkat Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		100%						
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		5 Dok	635,000,000	APBD			5 Dok	645,000,000
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tanjung Selor	2 Dok	150,000,000	APBD			2 Dok	150,000,000
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Tanjung Selor	1 Dok	100,000,000	APBD			1 Dok	100,000,000
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Tanjung Selor	1 Dok	100,000,000	APBD			1 Dok	100,000,000
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor	1 Dok	285,000,000	APBD			1 Dok	295,000,000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%						
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	12 Bulan	19,500,000,000	APBD			12 Bulan	19,700,000,000
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	12 Bulan	2,025,000,000	APBD			12 Bulan	2,030,000,000
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	1,500,000,000				12 Bulan	1,500,000,000
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor	75 Org	1,500,000,000	APBD			75 Org	1,500,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	1,751,000,000				12 Bulan	1,758,500,000
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	30 Unit	11,000,000	APBD			30 Unit	11,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	44Unit	365,000,000	APBD			44Unit	367,000,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	12 Bulan	196,000,000	APBD			12 Bulan	198,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	12 Bulan	53,000,000	APBD			12 Bulan	55,000,000
3	28	01	1.06	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas Kunjungan Tamu	Tanjung Selor	12 Bulan	26,000,000	APBD			12 Bulan	27,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor	12 Bulan	1,100,000,000	APBD			12 Bulan	1,100,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan		1 Unit	1,088,000,000				1 Unit	1,088,000,000
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Tanjung Selor	1 Unit	1,088,000,000	APBD			1 Unit	1,088,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1,332,000,000				12 Bulan	1,333,000,000
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	15,000,000	APBD			12 Bulan	15,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	87,000,000	APBD			12 Bulan	88,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	50,000,000	APBD			12 Bulan	50,000,000

3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	1,180,000,000	APBD				12 Bulan	1,180,000,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		68 Unit	430,000,000					68 Unit	433,000,000
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	48 Unit	180,000,000	APBD				48 Unit	183,000,000
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	20 Unit	250,000,000	APBD				20 Unit	250,000,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan		2%						2%	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarannya		10%						10%	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang dilakukan tata batas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 KPH	-	DBH DR	Mendukung 10 Program Prioritas Daerah	XX		5 KPH	2,700,000,000
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	20,000,000,000	DBH DR	Mendukung 10 Program Prioritas Daerah	XXI		20 Unit	20,050,000,000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan		1 Unit	1,300,000,000					1 Unit	10,000,000,000
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHJP	Kabupaten Malinau	2 Dok	Rp 1,300,000,000	DBH-DR		XXVII		3 Dok	10,000,000,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Unit Manajemen yang dibina		30%	705,000,000					30%	710,000,000
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen Informasi Usaha Kehutanan	5 Kabupaten/Kota	1 Dok	300,000,000	APBD		XXVI		1 Dok	300,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	5 Kabupaten/Kota	11 Unit	405,000,000	APBD		XXVIII		11 Unit	410,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun	Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina		80%	800,000,000					80%	800,000,000
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M³/Tahun	Jumlah pemegang izin usaha yang dibina	Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Bulungan	10 Dok/Rek	300,000,000	DBH-DR		XXV		10 Dok/Rek	300,000,000
3	28	03	1.07	03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 M³/Tahun melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Izin yang terbit	Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kota Tarakan,	5 Izin	500,000,000	DBH-DR		XXII		5 Izin	500,000,000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan		2%	11,720,000,000					2%	7,400,000,000
3	28	03	1.04	01	Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL		1 Dok	300,000,000					1 Dok	300,000,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50 Ha	1,500,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	V		50 Ha	1,500,000,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan	Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	200 Ha	3,000,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	IV		200 Ha	2,500,000,000
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kota Tarakan	5 Unit	500,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional	XIV		5 Unit	600,000,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	Kab. Bulungan, Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	3 Unit	6,000,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional	XIII		3 Unit	2,000,000,000

3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah pemegang Ijin berusaha yang dibina/diawasi	Kab. Bulungan	30 Izin Usaha	420,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	IX	30 Izin Usaha	500,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	16,460,000,000				10%	16,466,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Kali	2,710,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional	XVII	110 Kali	2,715,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Keg	13,750,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VI	8 Keg	13,751,000,000
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	10.000 Btg	1,000,000,000				20.000 Btg	1,050,000,000
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah pengekar benih/bibit yang tersertifikasi	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	5 Penyedia	250,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	XVI	5 Penyedia	300,000,000
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	Kab. Bulungan dan Kab. Malinau	10.000 Btg	400,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	XI	10.000 Btg	400,000,000
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah peredaran benih/bibit yang bersertifikat	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	1.000.000 Btg	350,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	XII	1.000.000 Btg	350,000,000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kawasan yang dikelola		10%	1,100,000,000				10%	1,100,000,000
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga		1 Kawasan	1,100,000,000	APBD			1 Kawasan	1,100,000,000
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah kawasan yang teridentifikasi/ yang disurvei	Nunukan	1 Kawasan	200,000,000	APBD		XXIX	1 Kawasan	200,000,000
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Tanjung Selor	50 Org	300,000,000	APBD		XXIII	50 Org	300,000,000
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah daerah penyangga yang dikelola	Bulungan - KTT	1 Lokasi	600,000,000	APBD		XXIV	1 Lokasi	600,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan		4 Izin	20,850,000,000				4 Izin	20,500,000,000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya		20 KUPS	20,850,000,000				20 KUPS	20,500,000,000
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Kab/Kota	100 Penyuluh	2,000,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	XIX	100 Penyuluh	2,000,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	5 Kab/Kota	20 KUPS	15,000,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	I	20 KUPS	15,000,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi	5 Kab/Kota	5 Unit	3,850,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	II	5 Unit	3,500,000,000

3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan		200 Ha	9,600,000,000				250 Ha	6,200,000,000
3	28.	06.	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	Kab. Nunukan, KTT dan Kab. Malinau	1 DAS	9,600,000,000	APBD			1 DAS	6,200,000,000
3.	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen yang disusun	Kab.Nunukan, KTT dan Kab. Malinau	2 Dok	5,000,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	III	1 Dok	1,000,000,000
3.	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang dibangun Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) nya	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	2 DAS	2,000,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	X	2 DAS	2,250,000,000
3.	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	5 Unit	1,000,000,000	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional	XV	5 Unit	1,100,000,000
3.	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan DAS yang dibina	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	5 Kelompok	750,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	VII	5 Kelompok	1,000,000,000
3.	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Forum DAS yang difasilitasi pembentukannya	Kab. Bulungan	2 Forum DAS	350,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	VIII	2 Forum DAS	350,000,000
3.	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	5 Kab/Kota Prov.Kaltara	10 Kali	500,000,000	APBD	Mendukung Prioritas Nasional	XVIII	10 Kali	500,000,000

Tabel 4

Rumusan Rencana Pogram /Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kehutanan UPTD KPH Tana Tidung Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Utara

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3	28	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		100%					100%	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan					12 Bulan	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi pelaksanaan ASN	Tana Tidung	12 Bulan	171,000,000	APBD	-	-	12 Bulan	171,000,000
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan					12 Bulan	
4	29	02	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tana Tidung	35 Pcs	4,000,000	APBD	-	-	0 Stell	4,000,000
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Tidung	0 Orang	100.000.000	APBD	-	-	5 Orang	100.000.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan					12 Bulan	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tana Tidung	0 Unit	2,000,000	APBD	-	-	5 Unit	2,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tana Tidung	5 Unit	50,000,000	APBD	-	-	5 Unit	50,000,000
4	29	02	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga	Tana Tidung	1 Unit	500,000				0 Unit	500,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah unit penyediaan bahan logistik kantor	Tana Tidung	40 Pcs	20,000,000	APBD	-	-	40 Pcs	20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	200 Lembar	14,000,000	APBD	-	-	200 Lembar	14,000,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Tana Tidung	10 Pcs	10,000,000	APBD	-	-	10 Pcs	10,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	5 Kali	450,000,000	APBD	-	-	40 Kali	450,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0 Unit					1 Unit	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mabel	Jumlah unit pengadaan Mabel	Dalam Prov. Kaltara	0 Unit	-				1 Unit	1,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan					12 Bulan	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa surat menyurat yang disediakan	Tana Tidung	20 Lembar	6,000,000	APBD	-	-	20 Lembar	6,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tana Tidung	12 Bulan	55,000,000	APBD	-	-	12 Bulan	55,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tana Tidung	3 Unit	8,000,000	APBD	-	-	3 Unit	8,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tana Tidung	72 OB	215,000,000	APBD	-	-	72 OB	215,000,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang terpelihara		24 Unit					24 Unit	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Tana Tidung	23 Unit	124,000,000	APBD	-	-	23 Unit	124,000,000
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya dilakukan Pemeliharaan/direhabilitasi	Tana Tidung	1 Unit	100,000,000	APBD	-	-	1 Unit	100,000,000
3	28	03			Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		10%					10%	
3	28	03	1.01		Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya		2 Unit					2 Unit	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Jumlah unit Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional	Tana Tidung	2 Unit	3,500,000,000	DBH	Mendukung 10 program prioritas daerah	I	2 Unit	3,500,000,000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan		2%					2%	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bulan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Tana Tidung	108 OB	450,000,000	DBH	Mendukung prioritas nasional	II	108 OB	450,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		10%					10%	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pengendalian Kerusakan Hutan	Tana Tidung	24 Kali	850,000,000	DBH	Mendukung 10 program prioritas daerah	III	24 Kali	850,000,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	03	1.05	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Tana Tidung	24 Kali	350,000,000	DBH	Mendukung prioritas nasional dan mendukung 10 program prioritas daerah	IV	24 Kali	350,000,000
3	28	03	1.09			Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar		100,000 Btg						
3	28	03	1.09	02		Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	Tana Tidung	100,000 Btng	250,000,000	DBH	Mendukung prioritas nasional	V	100,000 Btng	520,000,000
3	28	05				Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan (58 Unit Tahun 2020)		10 Ijin					10 Ijin	
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya		2 Kegiatan					2 Kegiatan	
3	28	05	1.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Tana Tidung	10 Orang	300,000,000	DBH	Mendukung prioritas nasional dan mendukung 10 program prioritas daerah	VI	10 Orang	300,000,000
3	28	05	1.01	02		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	Tana Tidung	16 KUPS	345,000,000	DBH	Mendukung prioritas nasional dan mendukung 10 program prioritas daerah	VII	16 KUPS	345,000,000
3	28	05	1.01	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan penyiapan lokasi Perhutanan Sosial	Tana Tidung	4 Kelompok	435,000,000	DBH	Mendukung prioritas nasional dan mendukung 10 program prioritas daerah	VIII	4 Kelompok	435,000,000

3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Lahan yang Dilakukan Perlindungan dan Pengamanan Hutan			Rp	2,200,000,000.00					Rp	2,200,000,000.00
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan	Tarakan dan Delta Kayan	24 Kali	Rp	500,000,000.00	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	VI	24 Kali	Rp	500,000,000.00
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi	2 Kegiatan	Rp	200,000,000.00	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	VII	2 Kegiatan	Rp	200,000,000.00
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tarakan dan Delta Kayan	5 Kegiatan	Rp	1,500,000,000.00	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	III	5 Kegiatan	Rp	1,500,000,000.00
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan			Rp	1,150,000,000.00					Rp	1,150,000,000.00
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya			Rp	1,150,000,000.00					Rp	1,150,000,000.00
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dalam Provinsi Kaltara dan Di Luar Provinsi	10 Orang	Rp	200,000,000.00	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	II	10 Orang	Rp	200,000,000.00
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Unit Usaha yang Dikembangkan	Tarakan dan Delta Kayan	10 Kelompok	Rp	150,000,000.00	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	X	10 Kelompok	Rp	150,000,000.00
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Calon Lokasi Perhutanan Sosial yang Difasilitasi	Tarakan dan Delta Kayan	5 Kegiatan	Rp	800,000,000.00	DBH DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	IV	5 Kegiatan	Rp	800,000,000.00

Tabel 6.
Rumusan Rencana Pogram /Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kehutanan UPTD KPH Malinau Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perakiraan Maju Rencana Tahun 20223	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3	28	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi								
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Malinau	12 Bulan	150,000,000	APBD			12 Bulan	150,000,000
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Malinau	37 Stel	29,600,000	APBD			37 Stel	29,600,000
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	2 Orang	210,000,000	APBD			2 Orang	210,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Malinau	10 Unit	6,000,000	APBD			10 Unit	6,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malinau	1 Unit	20,000,000	APBD			1 Unit	20,000,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	Malinau	12 Bulan	60,000,000	APBD			12 Bulan	60,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	12 Bulan	20,000,000	APBD			12 Bulan	20,000,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu	Malinau	12 Bulan	20,000,000	APBD			12 Bulan	20,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	80 Kali	450,000,000	APBD			80 Kali	450,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan								
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Malinau	500 Surat	15,000,000	APBD			500 Surat	15,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Malinau	12 Bulan	40,000,000	APBD			12 Bulan	40,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Malinau	5 Unit	20,000,000	APBD			5 Unit	20,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Malinau	12 Bulan	250,000,000	APBD			12 Bulan	250,000,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya								
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Malinau	2 Unit	50,000,000	APBD			2 Unit	60,000,000
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	Malinau	1 Unit	200,000,000	APBD			1 Unit	200,000,000
3	28	03			Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan								
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya								
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan	Kab. Malinau	1 Unit	1,817,500,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional	I	1 Unit	2,000,000,000
3	28	03	1.02		Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan								
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit RPHJP	Kab. Malinau	1 Dokumen	1,000,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	II	1 Dokumen	1,000,000,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Unit Manajemen yang di bina								
3	28	03	1.03	09	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasling	Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari	Kab. Malinau	1 Keg	250,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VIII	1 Keg	250,000,000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan								
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Unit Perencanaan yang disusun	Kab. Malinau	1 Dokumen	300,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional	IX	1 Dokumen	300,000,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	Kab. Malinau	5 Ha	500,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional	X	5 Ha	500,000,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan	Kab. Malinau	5 Ha	500,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional	XI	5 Ha	500,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan produksi hasil hutan								
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Berkurangnya kerusakan hutan akibat perambahan perambahan	Kab. Malinau	1 Keg	750,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	III	1 Keg	750,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Malinau	4 Keg	3,300,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	IV	4 Keg	3,300,000,000
3	28	05			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan								
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya								
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Luar Prov. Kaltara	5 Penyuluh	400,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VII	5 Penyuluh	400,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	Malinau	2 KUPS	200,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VI	2 KUPS	200,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi	Malinau	2 Unit	200,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	V	2 Unit	200,000,000

Tabel 4.5
Rumusan Rencana Pogram /Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kehutanan UPTD KPH Bulungan Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3	28	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		100%	1,845,000,000				100%	1,955,000,000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Kantor		12 Bulan	400,000,000				12 Bulan	500,000,000
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulungan	12 Bulan	400,000,000	APBD			12 Bulan	500,000,000
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Kantor								
4	29	02	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bulungan	20 Stel	20,000,000	APBD			20 Stel	20,000,000
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Bulungan	18 Orang	50,000,000	APBD			18 Orang	50,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum		12 Bulan	585,000,000				12 Bulan	595,000,000
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Komponen Listrik	Bulungan	12 Bulan	5,000,000	APBD			12 Bulan	5,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulungan	50 unit	180,000,000	APBD			50 unit	180,000,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan bahan logistik kantor		12 Bulan	60,000,000	APBD			12 Bulan	70,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Bulungan	12 Bulan	20,000,000	APBD			12 Bulan	20,000,000

3	28	01	1.06	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	Bulungan	12 Bulan	20,000,000	APBD			12 Bulan	20,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	12 Bulan	300,000,000	APBD			12 Bulan	300,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	260,000,000				100%	260,000,000
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang disediakan	Bulungan	12 Bulan	15,000,000	APBD			12 Bulan	15,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulungan	12 Bulan	40,000,000	APBD			12 Bulan	40,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulungan	12 Bulan	5,000,000	APBD			12 Bulan	5,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulungan	12 Bulan	200,000,000	APBD			12 Bulan	200,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan		1 Unit	2,000,000,000				1 Unit	2,200,000,000
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		1 Unit	2,000,000,000				1 Unit	2,200,000,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		16 Unit	425,000,000				21 Unit	425,000,000
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Bulungan	15 unit	250,000,000	APBD			20 unit	250,000,000
3	28	01	1.09	03	Penyewaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Yang di Sewa	Bulungan	1 Unit	175,000,000	APBD			1 Unit	175,000,000
3	28	03			Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		10%	#REF!				10%	#REF!
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan	Bulungan	1 Dok	600,000,000	DBH			1 Dok	620,000,000
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	Bulungan	1 keg	250,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	XIII	1 keg	270,000,000
3	28	03	1.01	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kegiatan Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu	Bulungan	1 keg	350,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	XII	1 keg	350,000,000

3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		20%	4,850,000,000				20%	4,900,000,000
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan	Bulungan	5 Kegiatan	4,000,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	III	5 Kegiatan	4,000,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan perlindungan Hutan	Bulungan	30 kali	350,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VIII	30 kali	350,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Bulungan	50 kali	500,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	IV	55 kali	550,000,000
3.	28.	03.	1.09		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas tutupan lahan bertambah dari kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis berkurang		2%	1,700,000,000				2%	1,700,000,000
3.	28.	03.	1.09	01.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya Bibit Tanaman dalam Merehabilitasi Lahan	Bulungan	20000 btg	800,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	X	20000 btg	800,000,000
3	28	03	1.04	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah dokumen usaha Kehutanan		1 Dok	400,000,000				1 Dok	400,000,000
3	28	03	1.04	03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Lahan Yang di Tanam		50 Ha	500,000,000				50 Ha	500,000,000
3	28	03	1.02		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan		2%	5,200,000,000				2%	5,120,000,000
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sapras Operasional KPH	Bulungan	120 unit	4,500,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	I	120 unit	4,550,000,000
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah kegiatan pembagian blok/petak Pengelolaan Hutan	Bulungan	3 Keg	300,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	XI	3 Keg	320,000,000
3	28	03	1.01	04	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJPdan RPHJPd	Bulungan	4 Dok	400,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	II	2 Dok	250,000,000

3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar		20.000 Batang	850,000,000				20.000 Batang	900,000,000
3	28	03	1.09	01	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	Bulungan	20.000 Btg	850,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional	IX	20.000 Btg	900,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan		5 Ijin	2,450,000,000				5 Ijin	2,490,000,000
3	28	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya		5 KUPS	2,450,000,000				5 KUPS	2,490,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan dan Jumlah KTH yang didampingi	Bulungan	5 KUPS	500,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VI	5 KUPS	530,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Unit perhutanan sosial yang terbentuk dan Jumlah Pengembangan Usaha KUPS	Bulungan	9 Unit	1,800,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	V	9 Unit	1,800,000,000
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Prgoraama Penyuluh yang dibuat	Bulungan	1 Dok	150,000,000	DBH	Mendukung Prioritas Nasional & 10 Program Prioritas Daerah	VII	1 Dok	160,000,000

Provinsi Kalimantan Utara
Rumusan Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan Dinas Kehutanan UPTD KPH Nunukan Tahun 2022
dan Prakiraan maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		100%					100%	
3	28	01	1	02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan					12 Bulan	
3	28	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nunukan	12 Bulan	140,000,000	APBD			12 Bulan	140,000,000
3	28	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan					12 Bulan	
3	28	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Nunukan	84 OB	315,000,000				84 OB	315,000,000
3	28	03				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan		10%					10%	
3	28	03	1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya		1 Unit					1 Unit	
3	28	03	1	01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan	Nunukan	5 Unit	1,494,367,173		Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	IV	5 Unit	1,643,832,245
3	28	03	1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan		3 Unit					3 Unit	
3	28	03	1	02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHJP	Nunukan	5 Dokumen	645,000,000	DBH-DR			5 Dokumen	650,000,000
3	28	03	1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan		2%					2%	
3	28	03	1	04	06	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	Pulau Nunukan	1 Unit	150,000,000	DBH-DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	V	1 Unit	150,000,000

3	28	03	1	05		Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		10%					10%	
3	28	03	1	05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	26 Kali	700,000,000	DBH-DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	VI	26 Kali	700,000,000
3	28	03	1	05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Umit IV (Nunukan)	3 Kegiatan	700,000,000	DBH-DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	VII	3 Kegiatan	700,000,000
3	28	05				Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan		1 Izin					1 Izin	
3	28	05	1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya		1 Kups					1 Kups	
3	28	05	1	01	01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Nunukan	6 Penyuluh	150,000,000	DBH-DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	III	6 Penyuluh	150,000,000
3	28	05	1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	Nunukan, Sebatik, Sembakung, Seimenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi,	15 Kelompok	150,000,000	DBH-DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	I	15 Kelompok	150,000,000
3	28	05	1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang difasilitasi	Nunukan, Sebatik Barat, Seimenggaris, Sembakung, Tulin Onsoi	4 unit	500,000,000	DBH-DR	Mendukung Prioritas Nasional dan 10 Program Prioritas Daerah	II	4 unit	500,000,000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan bagian dari rancangan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 serta bagian dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Utara yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan kehutanan 2022 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk melaksanakan RENJA ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dengan RENSTRA Tahun 2021- 2026 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.

Tanjung Selor, April 2021
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara




Ir. SYARIFUDDIN, MMA
Pembina TK I
NIP. 19640215 199703 1 002